

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya suatu organisasi baik itu di sektor Swasta maupun Pemerintah di era globalisasi saat ini. Perencanaan strategis dan penganggaran keuangan di dalam suatu organisasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk kelangsungan dan kemajuan sebuah organisasi di masa yang akan datang. Pentingnya perencanaan strategis dan penganggaran bagi suatu organisasi ditandai dengan:

1. Terjadinya Perbaikan proses pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya (*allocative efficiency*) fokus pada prioritas dan transparansi yang lebih baik dalam alokasi pendanaan.
2. Terwujudnya konsistensi perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif
3. Tersedianya informasi kinerja yang tegas dan jelas sebagai dasar penyusunan anggaran

Sedangkan kemajuan sebuah organisasi dapat dilihat dengan tercapainya visi dan misi dari organisasi tersebut serta kemampuan organisasi di dalam menghadapi pengaruh lingkungan internal maupun eksternal sehingga suatu organisasi tetap bertahan terhadap pengaruh lingkungan yang ada. Di dalam pencapaian visi suatu organisasi salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan cara optimalisasi program kerja, cara ini dapat membantu tercapainya visi dari

organisasi tersebut. Perencanaan strategis diharapkan dapat menolong organisasi di dalam melakukan tugasnya untuk lebih baik serta dapat membantu organisasi agar lebih fokus terhadap visi dan prioritasnya sebagai jawaban terhadap lingkungan yang berubah serta memastikan agar anggota-anggotanya dapat bekerja ke arah tujuan yang sama. Perencanaan Strategis di dalam Pemerintahan diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dan perencanaan pembangunan didalam pencapaian visi dan misi daerah. Sebagai Dokumen yang memuat rencana pembangunan satu tahun ke depan, maka diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Salah satu proses pendekatan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah melalui pelaksanaan Rembug Warga/Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Di dalam penyusunan anggaran pada sektor pemerintahan merupakan hal yang harus dilakukan, tanpa anggaran suatu program dan kegiatan di dalam pemerintahan tidak dapat berjalan. Penyusunan anggaran pada sektor Pemerintahan di sesuaikan dengan peraturan lembaga yang lebih tinggi yaitu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangannya yang merupakan konsekuensi adanya perubahan sistem

pemerintahan di daerah dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Sistem sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan serta wewenang pemerintahan sepenuhnya kepada pemerintah pusat sedangkan sistem desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pusat ke daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam rangka optimalisasi program kerja, Pemerintah Kota Blitar mengeluarkan salah satu program yang dinamakan PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). Program ini merupakan salah satu kontribusi Pemerintah Kota Blitar didalam penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Blitar. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) terdiri dari;

1. Fisik konstruksi yaitu kegiatan yang bersifat pembangunan fisik bangunan/konstruksi meliputi: pekerjaan rehabilitasi, renovasi, revitalisasi serta pengadaan konstruksi sederhana dan prasarana umum skala Kelurahan/RT/RW.
2. Fisik non konstruksi yaitu kegiatan yang wujudnya fisik tetapi tidak dalam bentuk konstruksi bangunan, ditekankan pada kegiatan pengadaan (materi) penunjang pembangunan skala Kelurahan/RT/RW yang sangat dibutuhkan masyarakat.
3. Non fisik yaitu kegiatan yang bersifat meningkatkan, memantapkan dan mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik dalam bentuk pemberdayaan potensi sosial dan budaya maupun ekonomi.

Usulan kegiatan-kegiatan tersebut diakomodir melalui Rembug Warga/Musrenbang. Musrenbang merupakan forum musyawarah pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah masyarakat Kelurahan dan kegiatan dimaksud dilakukan secara berjenjang mulai Tingkat RT,RW, Kelurahan, Kecamatan hingga Tingkat Kota. Kegiatan Pemangku kepentingan ini untuk merumuskan dan menyepakati rencana pembangunan daerah untuk periode 1(satu) Tahun. Adanya semangat kegotong-royongan yang dimulai sejak awal pada proses perencanaan pembangunan inilah, diyakini hasil-hasil pembangunan akan lebih bermakna dan menjadikan milik bersama yaitu semua lapisan masyarakat. Pada saat Rembug Warga/Musrenbang Tingkat RT, RW dan Kelurahan, usulan kegiatan pembangunan disesuaikan dengan kebutuhan (bukan keinginan) masyarakat dan dibuka ruang seluas luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Salah satu titik kritis yang perlu perhatian bersama di dalam Rembug Warga/Musrenbang ini adalah pada saat penentuan usulan kegiatan pembangunan masuk kebutuhan atau hanya keinginan, sehingga perlu kearifan lokal dari masing- masing peserta Rembug Warga/Musrenbang untuk mendefinisikan kebutuhan pembangunan di lingkungannya.

Pelaksanaan Rembug Warga/Musrenbang Tingkat RT, RW dan tingkat Kelurahan selalu memperhatikan prioritas/program kegiatan dengan spesifikasi yaitu;

Prioritas I adalah program/kegiatan yang sangat mendesak untuk dilaksanakan (darurat) karena jika tidak segera dilaksanakan akan membawa dampak yang

bersifat multiplier (mengakibatkan kerugian langsung yang lebih besar pada masyarakat setempat), Prioritas II adalah program/kegiatan yang bersifat rehabilitasi atau revitalisasi sehingga walaupun termasuk kegiatan penting akan tetapi tidak secara langsung membawa dampak pada masyarakat, Prioritas III adalah program/kegiatan prioritas yang membawa dampak jangka panjang akan tetapi keberadaannya adalah suatu keniscayaan.

Adanya partisipatif masyarakat untuk mengikuti dan menghadiri Rembug Warga/Musrenbang yang dilaksanakan di Tingkat RT,RW maupun tingkat Kelurahan , maka diharapkan hasil–hasil dari Rembug Warga/Musrenbang akan optimal , karena Rembug Warga/Musrenbang merupakan wadah untuk melakukan jajak kebutuhan (*need assessment*) bagi penyiapan usulan kegiatan pembangunan tahunan di tingkat kelurahan. Partisipatif masyarakat yang rendah untuk mengikuti Rembug Warga/Musrenbang akan menjadikan usulan–usulan di dalam Rembug Warga/Musrenbang tidak optimal, disebabkan usulan–usulan masyarakat tidak terakomodir seluruhnya. Hasil–Hasil Musrenbang di tingkat RT,RW dan Kelurahan digunakan sebagai landasan untuk penganggaran pada RKA (Rencana Kegiatan Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) setiap tahunnya.

Kelurahan Tanjungsari sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Blitar, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat harus mampu bersinergi dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat melalui Rembug Warga/Musrenbang dituangkan di dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang nantinya Rencana Kerja Satuan Perangkat

Daerah (Renja SKPD) Kelurahan Tanjungsari diakomodir ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Hasil Rembug Warga/Musrenbang di dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) akan diimplementasikan ke dalam salah satu program dan kegiatan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Oleh sebab itu berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini diberi judul:

“Strategi Perencanaan dan Penganggaran dalam Rangka Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar”

B. Permasalahan

Penganggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dengan kegiatan: fisik konstruksi, non fisik, maupun fisik nonkonstruksi ,didahului dengan perencanaan di tingkat RT, RW maupun Tingkat Kelurahan yang disebut dengan Rembug Warga/Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada awal tahun yang dipergunakan sebagai dasar penganggaran tahun berikutnya. Rendahnya antusiasme kehadiran masyarakat untuk mengikuti kegiatan Rembug Warga/Musrenbang yang rata-rata berkisar hanya 52 % dari jumlah undangan yang seharusnya hadir menjadikan usulan-usulan yang dibuat tidak optimal, karena masih ada sebagian undangan yang tidak menyalurkan aspirasinya.

Hasil dari Rembug Warga/Musrenbang tingkat RT dan RW dijadikan sebagai usulan pada Rembug Warga/Musrenbang di Tingkat Kelurahan yang nantinya usulan dimaksud akan dijadikan sebagai dasar Penganggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang akan dimasukkan didalam RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) dan (DPA) Dokumen Penggunaan Anggaran Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo Kota Blitar setiap tahunnya. Tidak optimalnya ketika pelaksanaan Rembug Warga/Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Tingkat RT, RW maupun tingkat Kelurahan akan berdampak terhadap masyarakat selaku penerima manfaat dari Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, didalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan permasalahan yaitu:

Bagaimana strategi perencanaan dan penganggaran dalam rangka optimalisasi PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) melalui Rembug Warga/Musrenbang di tingkat RT/RW dan Kelurahan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini mempunyai tujuan :
Untuk mengetahui bagaimana strategi perencanaan dan penganggaran dalam rangka optimalisasi PPMK (Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) melalui Rembug Warga/Musrenbang di tingkat RT, RW dan Kelurahan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menguji pemahaman Ilmu yang bersifat teoritis kedalam penelitian langsung sehingga akan menambah wawasan dan pendalaman Ilmu Pengetahuan

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai informasi dan bahan referensi Kelurahan lain yang mempunyai permasalahan yang sama.

3. Bagi Institusi Perguruan Tinggi

Diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan dan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian selanjutnya, sehingga dapat menjadi lebih baik. Selain itu dapat menjadi masukan terhadap pengembangan ilmu Manajemen khususnya Manajemen Strategik.

